

## *Policy Brief*

# **Menjamin Objektivitas dan Kredibilitas dalam Penilaian Buku Pendidikan Agama: Pentingnya Integritas dan Akuntabilitas Penilai**

Oleh: Maudy Mishfanny

## **Ringkasan Eksekutif**

Penilaian buku pendidikan agama adalah elemen krusial dalam menentukan kualitas materi ajar yang mempengaruhi pemahaman siswa terhadap ajaran agama. Namun, tantangan seperti konflik kepentingan, bias dalam penilaian, kurangnya standar yang konsisten, dan keterbatasan pengetahuan penilai dapat mengancam integritas proses ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengembangan standar penilaian yang jelas, pelatihan rutin bagi penilai, transparansi dalam proses penilaian, serta audit dan evaluasi berkala. Peningkatan dukungan dan sumber daya bagi penilai juga penting untuk memastikan penilaian yang objektif dan berkualitas. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat sistem pendidikan agama dan mendukung pembentukan pemahaman yang adil dan moderat di kalangan siswa melalui bahan ajar buku.

## **Pendahuluan**

Dalam konteks pendidikan agama, buku teks berperan penting dalam membentuk pemahaman dan sikap siswa terhadap ajaran agama yang moderat dan sesuai dengan nilai norma Pancasila. Oleh karena itu, penilaian buku pendidikan agama harus dilakukan dengan cermat dan objektif. Integritas penilai merupakan kunci utama untuk memastikan bahwa buku-buku ini memenuhi standar kualitas dan relevansi yang diperlukan. *Policy brief* ini membahas pentingnya integritas penilai dalam penilaian buku pendidikan agama dan merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas penilaian tersebut.

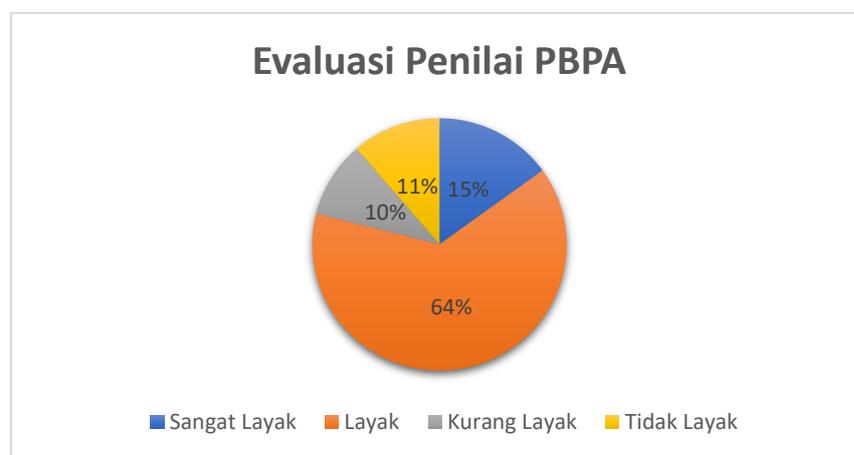
## **Deskripsi Masalah**

Penilaian buku pendidikan agama adalah proses krusial yang mempengaruhi kualitas pendidikan agama dan pembentukan pemahaman siswa tentang ajaran agama. Namun, terdapat berbagai tantangan yang dapat mengancam integritas dalam proses penilaian ini, termasuk:

1. **Konflik Kepentingan:** Penilai dapat mengalami tekanan atau pengaruh dari pihak luar seperti organisasi agama, penerbit, atau kelompok tertentu, yang menyebabkan *conflict of interest*, sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam penilaian buku. Konflik kepentingan ini dapat mengarah pada penilaian yang tidak objektif dan keberpihakan terhadap buku tertentu.
2. **Kurangnya Standar Penilaian yang Konsisten:** Ketidaktahuan atau ketidakpastian mengenai standar penilaian yang berlaku dapat mengakibatkan penilaian yang subjektif. Tanpa pedoman penggunaan instrumen penilaian yang jelas dan konsisten, penilai bisa multitafsir dalam menginterpretasikan makna instrumen penilaian. Penilai mungkin memiliki interpretasi yang berbeda mengenai apa yang memenuhi kriteria kualitas dan relevansi, yang mengarah pada inkonsistensi dalam keputusan penilaian.
3. **Keterbatasan Pengetahuan dan Keahlian:** Penilai yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran agama atau metodologi penilaian yang baik dapat mengalami

kesulitan dalam menilai buku secara objektif dan akurat. Keterbatasan ini dapat mengurangi kualitas penilaian dan berdampak pada materi yang digunakan dalam pendidikan agama.

Masalah-masalah tersebut dapat mengancam integritas sistem penilaian buku pendidikan agama dan dapat mengakibatkan mutu buku pendidikan agama yang tidak berkualitas, tidak objektif, atau bias. Berdasarkan grafik di bawah ini, diketahui bahwa terdapat 133 jumlah penilai tahun 2023, dengan hasil evaluasi penilai 10% kurang layak dan 11% tidak layak. Hal ini menunjukkan penilai yang belum semua memiliki integritas, kompetensi, dan kapabilitas yang memenuhi kualifikasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya formulasi kebijakan yang dapat meningkatkan integritas penilai penilaian buku pendidikan agama.



### **Rekomendasi/Alternatif Kebijakan**

#### **1. Penyusunan Standar atau Pedoman Instrumen Penilaian:**

Menetapkan dan menyusun standar atau pedoman penggunaan instrumen penilaian yang jelas, sehingga dapat dipastikan bahwa semua penilai mengikuti pedoman penggunaan instrumen yang sama. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan multitafsir dari instrumen penilaian.

#### **2. Pelatihan dan Pendidikan (Diklat) Penilai:**

Memberikan diklat khusus bagi penilai secara tatap muka dan intensif mengenai prinsip-prinsip penilaian yang objektif dan sesuai dengan kaidah. Diklat khusus ini untuk membahas secara mendalam mengenai penyamaan dan pemahaman instrumen penilaian.

#### **3. Proses Penilaian yang Transparan:**

Mengimplementasikan proses penilaian yang transparan melalui laman [pbpa.kemenag.go.id](http://pbpa.kemenag.go.id), termasuk adanya fitur *feedback* terhadap penilai, untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas dalam penilaian. Hal ini dapat diungkapkan juga dengan memasukan fitur memberikan *rating* kepada penilai dari para penerbit/pengguna.

#### **4. Peningkatan Dukungan dan Sumber Daya:**

Menyediakan dukungan tambahan dan sumber daya bagi penilai adalah langkah krusial untuk memastikan keberhasilan proses penilaian. Hal ini melibatkan penyediaan akses yang memadai ke materi diklat yang *open access* meskipun diklatnya sudah selesai, dapat beruda modul pelatihan, panduan, dan lain sebagainya. Dukungan ini tidak hanya

membantu penilai dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif, tetapi juga berkontribusi pada konsistensi dan kualitas penilaian secara keseluruhan. Implementasi sistem dukungan yang komprehensif ini memastikan bahwa penilai memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk melakukan evaluasi dengan akurat dan efisien.

### **Kesimpulan/Penutup**

Integritas penilai dalam penilaian buku pendidikan agama sangat penting untuk memastikan bahwa buku yang digunakan dalam pendidikan agama adalah berkualitas dan bebas dari multitafsir. Dengan penyusunan standar atau pedoman instrumen penilaian yang jelas, memberikan pelatihan yang memadai, dan menerapkan proses yang transparan, kita dapat meningkatkan keakuratan dan objektivitas dalam penilaian buku pendidikan agama. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat sistem pendidikan agama tetapi juga mendukung pembentukan pemahaman yang benar dan moderat di kalangan siswa.